



**PROSPEK KEDUDUKAN HUKUM TENAGA HONORER DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA
SEMARANG**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MEYSISKA MAHARANI HERU PUTRI

NIM 11000120140865

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Prospek Kedudukan Hukum Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di Kota Semarang**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

MEYSISKA MAHARANI HERU PUTRI

NIM 11000120140865

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Henny Juliani, S.H., M.H.

NIP 196307171988032001

Dosen Pembimbing II



F.C. Susila Adiyanta S.H., M.Hum.

NIP 196609111992031003

HALAMAN PENGUJIAN

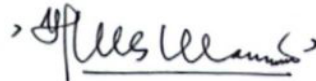
PROSPEK KEDUDUKAN HUKUM TENAGA HONORER DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA
SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MEYSISKA MAHARANI HERU PUTRI
NIM 11000120140865

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji
Ketua



Henny Juliani, S.H., M.H.
NIP 196307171988032001

Anggota Penguji I




F.C Susila Adiyanta S.H., M.Hum.,
NIP. 196609111992031003

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Undip



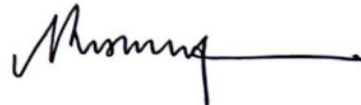
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 19671191993032002

Anggota Penguji II



Dr. Bndi Ispriyarso, S.H., M.H.
NIP. 196212081987031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Februari 2024



Meysiska Maharani Heru Putri

NIM 11000120140865

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*nya aja. Jadi, berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, tetap berjuang ya!”

PERSEMBAHAN

Pertama-tama, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sampai di titik ini, lalu, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Ibu Christina Retno Yuliati dan alm. Ayah M. Yasin Heru Wahyono. Tidak lupa pula saya persembahkan kepada Kakak tercinta saya yang memiliki keterbutuhan khusus, Evi Yuliani Heru Putri, serta keluarga besar maupun sahabat yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan menjadi motivasi dalam keberjalanan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan hukum yang berjudul **“Prospek Kedudukan Hukum Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang”**

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini dengan memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, antara lain kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Suhartoyo S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Henny Juliani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk membimbing serta

memberikan pengarahan dan saran ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta memberikan pembelajaran dari sebuah kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Bapak FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk membimbing serta memberikan pengarahan dan saran ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta memberikan pembelajaran dari sebuah kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Dyah Widjaningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah mendukung dan membantu kelancaran dalam penulisan hukum ini.
8. Seluruh dosen dan bagian civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Ibu Istiqomah, S.H., M.M., selaku Narasumber yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan informasi yang bermanfaat bagi kelancaran penulisan hukum ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta alm. Bapak M. Yasin Heru Wahyono, S.H., selaku ayah dari penulis dan Ibu Christina Retno Yuliati, S.E. yang selama ini menjadi ibu sekaligus ayah bagi penulis yang selalu memberikan doa, memberikan bantuan untuk penulis baik materi maupun non materi, serta dukungan kepada penulis.

11. Satu-satunya saudara kandung penulis Evi Yuliani Heru Putri, selaku kakak tercinta dengan segala keterbatasannya serta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan motivasi tinggi kepada penulis selama ini.
12. Kevin Caesar Ricardo, A.Md, terima kasih telah memberikan kontribusi yang cukup besar selama ini, baik dorongan motivasi maupun dukungan yang selalu diberikan serta menemani dalam perjalanan penulisan hukum ini.
13. Seluruh keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2021 dan 2022 terkhusus Bidang Minat dan Bakat yang telah menjadi salah satu perjalanan kehidupan yang memberikan pengalaman lebih bagi penulis.
14. Kakak tingkat saya, Nur Setyowati, S.H., yang telah saya anggap sebagai kakak saya sendiri dan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran penulisan hukum ini.
15. Sahabat penulis, Nisrina Putri Hapsari, Salma Putri Ayuivia, Aisha Shafa Kamila, Salwa Putri Hadiyan, Clarrisa Eka Putri, Gharin Fikriani, Afrida Sinta, Fadilla Hamestuti, Salsabilla Azalea, Adelia Lubna, Teresa Amanda, dan teman teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Mengingat bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Untuk itu, dengan segala kerendahan dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengharapkan saran dan

kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan untuk penyempurnaan penulisan hukum ini.

Harapan penulis, penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun secara khusus terhadap pengembangan ilmu hukum serta almamater Universitas Diponegoro Semarang, Aamiin.

Semarang, 1 Februari 2024

Meysiska Maharani Heru Putri

NIM 1100012010865

ABSTRAK

Jumlah tenaga honorer sampai dengan 1 April tahun 2023 mencapai 2,3 juta orang. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan memperjelas status tenaga honorer untuk mendapatkan hak-hak yang layak sesuai dengan kontribusi dan pengabdianya kepada negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga honorer dan prospek kedudukan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang,

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Realitas perlindungan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang mencakup hak dan kewajiban tenaga honorer di lingkungan daerah Kota Semarang dilindungi oleh regulasi, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak di Lingkungan Kota Semarang yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban tenaga honorer diatur secara rinci di dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 2) prospek kedudukan hukum tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang dipastikan akan dihapus tetapi jika tenaga honorer masih ingin bekerja dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ASN, pemerintah memberikan pilihan yaitu dengan mengikuti rekrutmen ASN umum maupun khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun rekomendasi/saran dari penelitian yang telah dilakukan meliputi: 1) Pemerintah harus mengeluarkan peraturan turunan yang lebih rinci tentang proses perubahan tenaga honorer menjadi tenaga ASN mulai dari persyaratan yang jelas, larangan yang tidak boleh dilanggar tenaga honorer itu sendiri maupun pemerintah, serta kedudukan yang jelas untuk tenaga honorer. 2). Pemerintah harus melakukan proses rekrutmen ini dengan sistem merit dan memperhatikan tenaga honorer yang telah mengabdikan bertahun-tahun kepada instansi pemerintah agar diberikan proses yang khusus.

Kata kunci : Tenaga Honorer, ASN, Kedudukan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RAGAAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Lokasi Penelitian	13
6. Metode Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
G. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pekerjaan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara	18
1. Pekerjaan sebagai Hak Fundamental Individu	18
2. Bekerja dan Hak memperoleh Pekerjaan sebagai Hak Konstitusional Warga Masyarakat	20
B. Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 25	
1. Aparatur Sipil Negara.....	25
2. Tugas, Fungsi, dan Peran ASN sebagai Fungsionaris Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27

C. Kedudukan dan Hubungan Hukum antara Badan Administrasi Pemerintahan dengan ASN sebagai Fungsionaris Jabatan Administrasi Pemerintahan	29
1. Jabatan Nonmanajerial menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	29
2. Hubungan Hukum antara Jabatan Administrasi Negara dengan Aparatur Sipil Negara dari Perspektif Hukum Kepegawaian.....	33
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perlindungan Hukum Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang	38
1. Payung Hukum Hak dan Kewajiban Tenaga Honorer	38
2. Realitas Perlindungan Hukum Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang	42
B. Kedudukan Hukum Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang	57
1. Komparasi Status Hukum Tenaga Honorer dalam Struktur Birokrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023	57
2. Aktualisasi Kedudukan Hukum Tenaga Honorer dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang	59
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	47
Tabel 3.2 Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti di Seluruh Indonesia.....	50

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 3.1 Bagan Alir Perlindungan Hukum Tenaga Honorer.....	40
Ragaan 3.2 Bagan Alir Langkah Penataan Tenaga Honorer.....	44
Ragaan 3.3 Komposisi Eselon PNS.....	46
Ragaan 3.4 Komposisi Eselon dan Tipe Jabatan Fungsional PPPK.....	46
Ragaan 3.5 Bagan Alir Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023.....	58